

Selasa, 09/12/2014 15:00 WIB

## DPR Ajak Masyarakat Teken Petisi Online Adili Grand Corruption

Indah Mutiara Kami - detikNews

### FOKUS BERITA

Hari Anti Korupsi

**Jakarta** - Di Hari Antikorupsi Internasional ini, DPR RI memperkuat kampanye internasional dari Global Parliamentarians for Against Corruption (GOPAC). Kampanye itu termasuk

penandatanganan petisi online yang mendesak mengadili grand corruption.

"Database GOPAC, negara berkembang dirugikan US\$ 5,9 triliun yang dilarikan koruptor ke luar negeri. Lewat petisi ini, diharapkan setiap WNI bisa kirim keluhannya," kata Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaff dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2014).

Dalam konferensi pers ini, hadir pula Wakil Ketua BKSAP Teguh Juwarno dan Meutya Hafidz. Ada pula Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Petisi online bisa diakses di <http://gopacnetwork.org/preventprosecuteparalyze> yang diluncurkan hari ini. Gerakan ini menggunakan tagar #PreventProsecuteParalyze.

Di lingkup DPR RI sendiri, Nurhayati ingin mengajak semua anggota DPR untuk mewujudkan kewibawaannya dengan bersih dari korupsi.

"Wujudkan DPR yang bersih dan berwibawa. Bersih dari korupsi jadi punya wibawa. Kita tidak hanya berantas tapi juga cegah. Kita ingin bangkitkan kesadaran," ucap Waketum PD ini.

DPR juga akan segera memperbaharui keanggotaan Gugus Tugas Anti-Korupsi atau GOPAC Indonesia Chapter juga dalam waktu dekat. Anggota BKSAP Meutya Hafid mengajak para anggota DPR lain untuk bergabung dengan gugus tugas ini. Menurut Meutya, penyakit korupsi ini harus dilawan dalam skala internasional.

"Ada penyakit yang tidak bisa diatasi sendiri oleh suatu negara. Bukan keren-kerenan, tapi ada yang perlu dilakukan lewat gerakan sedunia," ucap politikus Golkar ini.

GOPAC adalah aliansi yang terdiri dari anggota parlemen seluruh dunia yang bekerjasama untuk memerangi korupsi, memperkuat pemerintahan yang baik, dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Berbasis di Ottawa, Kanada, GOPAC memiliki 51 gugus nasional di 5 benua. GOPAC mendukung upaya anggotanya melalui penelitian, capacity building dan international peer support.

**Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV**

(imk/mok)

# DPR Galang Petisi Online untuk Adili Grand Corruption

Selasa, 9 Desember 2014 15:45 WIB



Fadli Zon

**TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA** - DPR RI mendukung gerakan South East Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC) menggalang petisi online membawa kasus-kasus korupsi utama agar dapat diadili melalui mekanisme internasional.

Salah satu upaya tersebut adalah dengan memperkuat kampanye GOPAC (Global Parliamentarians or Against Corruption) untuk menggolongkan kejahatan korupsi utama (grand corruption) sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

"Bila komunitas internasional setuju, maka grand corruption dapat masuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan dan yurisdiksi pengadilan internasional bisa bergerak. Kejahatan kemanusiaan bisa diadili melalui Statuta Roma," kata Wakil Ketua DPR [Fadli Zon](#) di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/12/2014).

Upaya tersebut, ujar Fadli, membutuhkan kampanye yang terus menerus dari komunitas internasional. Saat ini, kata politisi Gerindra tersebut, GoPAC telah mendesain micro-site untuk mendukung kampanye tersebut yang berada di alamat [gopacnetwork.org/preventprosecuteparalyze/](http://gopacnetwork.org/preventprosecuteparalyze/).

Situs mikro tersebut diluncurkan pada hari ini, 9 Desember 2014, bertepatan dengan peringatan hari Anti-Korupsi Internasional. Dengan kampanye yang secara resmi diberi tagar #PreventProsecuteParalyze ini, SEAPAC berharap masyarakat luas akan tergerak untuk mengirim petisi, member pesan ke dunia internasional bahwa korupsi mutlak untuk dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan," katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua BKSAP Teguh Juwarno, yang memaparkan masifnya dampak dari kejahatan grand corruption tersebut bagi

kemanusiaan. Beberapa kejahatan korupsi sangatlah parah, sehingga berdampak pada kehidupan manusia dan merenggut hak asasi manusia (HAM), sehingga perlu untuk digolongkan sebagai kejahatan kemanusiaan.

"Berdasarkan riset GoPAC, pada zaman Moammar Khadafi, aliran dana ilegal yang mengalir ke rezimnya diperkirakan mencapai \$ 212 miliar (2002-2011)," ujarnya.

Penulis: Ferdinand Waskita  
Editor: Johnson Simanjuntak

SELASA, 09 DESEMBER 2014

## **DPR Dukung Petisi Online Adili Korupsi di Peradilan Internasional**

**Butuh kampanye terus menerus dari komunitas internasional.**



Gedung DPR. Foto: RES

DPR RI mendukung gerakan South East Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC) menggalang petisi online membawa kasus-kasus korupsi utama agar dapat diadili melalui mekanisme internasional.

"Bila komunitas internasional setuju, maka grand corruption dapat masuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan dan yurisdiksi pengadilan internasional bisa bergerak. Kejahatan kemanusiaan bisa diadili melalui Statuta Roma," Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (9/12).

Fadli mengatakan, salah satu upaya tersebut adalah dengan memperkuat kampanye 'Global Parliamentarians or Against Corruption' (GOPAC) untuk menggolongkan kejahatan korupsi utama sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Upaya tersebut menurut Fadli, membutuhkan kampanye yang terus menerus dari komunitas internasional. "Saat ini, GoPAC telah mendesain micro-site untuk mendukung kampanye tersebut yang berada di alamat [gopacnetwork.org/preventprosecuteparalyze/](http://gopacnetwork.org/preventprosecuteparalyze/)," ujarnya.

Gerakan anti korupsi anggota parlemen di tingkat Asia tenggara, menurut Fadli Zon, akan berperan besar dalam kampanye tersebut. Menurut dia, seiring dengan penguatan komunitas regional akan ada sedikitnya 600 masyarakat ASEAN yang tentu memiliki harapan besar terhadap penguatan rezim anti-korupsi di dunia.

"Kami menyadari bahwa mekanisme untuk membawa Grand Corruption ke ranah peradilan internasional masih perlu dikaji lebih mendalam, dan karenanya mendorong GOPAC untuk mengidentifikasi dan dikaji lebih mendalam langkah yang dapat membantu ide tersebut," ujarnya.

Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang membidangi desk regional, Teguh Juwarno mengatakan masifnya dampak dari kejahatan grand corruption tersebut bagi kemanusiaan.

Dia menjelaskan, dampak beberapa kejahatan korupsi sangat parah, sehingga berdampak pada kehidupan manusia dan merenggut hak asasi manusia (HAM), sehingga perlu untuk digolongkan sebagai kejahatan kemanusiaan.

"Berdasarkan riset GoPAC, pada zaman Moammar Khadafi, aliran dana ilegal yang mengalir ke rezimnya diperkirakan mencapai 212 miliar dolar (2002-2011). Bayangkan manfaatnya bila digunakan untuk kesejahteraan publik," ungkap Teguh.

Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, BKSAP juga akan mendorong gerakan preventif seperti gerakan moral antara sesama anggota DPR untuk berkomitmen menciptakan DPR sebagai institusi yang bersih dan berwibawa.

Nurhayati memberikan dukungan kepada Komisi III DPR RI untuk menguatkan peran badan penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.

"Kami juga mendukung Mahkamah Kehormatan sebagai sebuah alat kelengkapan baru DPR RI untuk memaksimalkan kewenangan yang telah di dalam mendorong dan menjaga integritas Anggota DPR RI," ujarnya.

Menurutnya, DPR juga akan segera memperbaharui keanggotaan Gugus Tugas Anti-Korupsi atau GoPAC Indonesia Chapter juga dalam waktu dekat. Dia mengatakan hal itu segera dilakukan setelah masa persidangan dimulai mengingat pergantian periode anggota DPR menyebabkan tenadinya pergantian keanggotaan dalam GoPAC Indonesia.

Rabu, 10 Desember 2014 , 03:30:00

## DPR Galang Petisi Online untuk Adili Koruptor Kakap

**JAKARTA** - DPR mendukung gerakan South East Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC) dengan menggalang petisi online untuk membawa kasus-kasus korupsi utama agar dapat diadili melalui mekanisme internasional. Upaya itu dilakukan dengan memperkuat kampanye Global Parliamentarians or Against Corruption (GOPAC) untuk menggolongkan kejahatan korupsi utama (grand corruption) sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Menurut Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, bila komunitas internasional setuju maka grand corruption dapat masuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan. "Dan yurisdiksi pengadilan internasional bisa bergerak. Kejahatan kemanusiaan bisa diadili melalui Statuta Roma," katanya di gedung DPR, Selasa (9/12).

Fadli nantinya akan menjadi Ketua SEAPAC. Pasaunya, keketuaan SEAPAC masih menjadi giliran Indonesia.

Fadli menambahkan, upaya untuk menggolongkan grand corruption itu membutuhkan kampanye terus-menerus dari komunitas internasional. Saat ini, GOPAC telah mendesain micro-site untuk mendukung kampanye tersebut yang berada di alamat [gopacnetwork.org/preventprosecuteparalyze/](http://gopacnetwork.org/preventprosecuteparalyze/). Situs mikro tersebut diluncurkan Selasa (9/12), bertepatan dengan peringatan hari Anti-Korupsi Internasional.

Sedangkan Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Teguh Juwarno mengatakan, grand corruption berdampak masif dan merenggut hak asasi manusia (HAM). Karenanya, korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan kemanusiaan.

"Berdasarkan riset GOPAC pada zaman Moammar Khadafi (pemimpin Libya, re), aliran dana ilegal yang mengalir ke rezimnya diperkirakan mencapai USD 212 miliar. Bayangkan manfaatnya bila digunakan untuk kesejahteraan publik," ucapnya. **(fat/jpnn)**